

Implementasi Program Pencegahan Hiv/Aids Pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) Di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru

Tri Melisya Andriani¹ Lilis Suriani²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
trimelisyaaandriani@student.uir.ac.id lilissuriani@soc.uir.ac.id

Received : 2 Desember, 2024;

Accepted : 10 Desember 2024

Abstract

HIV/AIDS is a global health problem that continues to increase, especially among the key population group of men who have sex with men (MSM). Puskesmas is a primary health care facility for the HIV/AIDS prevention program. This research aims to analyze the implementation of the HIV/AIDS prevention program among MSM at the Republic of Indonesia Sidomulyo Community Health Center, Pekanbaru City. The research method in this study is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation and documentation. Respondents consisted of health workers and several members of the MSM population targeted by the program. The research results show that the implementation of HIV/AIDS prevention in community health centers has gone well, although there are several obstacles, such as stigma and discrimination from the community. The existence of this societal stigma means that some levels of society still do not want to accept the socialization of this program. This research concludes that the Indonesian Health Center Sidomulyo Kota Pekanbaru has a significant role in preventing HIV/AIDS among MSM. However, to increase the effectiveness of the program, improvements in the training of health workers, provision of adequate resources, and campaigns to reduce stigma towards MSM are needed.

Keywords : HIV/AIDS, Preventif, Leak Sexual Men (MSM), Health Center, Public Health

Abstrak

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat, terutama di kelompok populasi kunci Lelaki Seks Lelaki (LSL). Puskesmas merupakan fasilitas layanan kesehatan primer program pencegahan HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pencegahan HIV/AIDS di kalangan LSL pada Puskesmas RI Sidomulyo Kota Pekanbaru. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Responden terdiri dari petugas kesehatan dan beberapa anggota populasi LSL yang menjadi sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pencegahan HIV/AIDS di puskesmas telah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala, seperti stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Adanya stigma masyarakat tersebut menyebabkan beberapa lapisan masyarakat masih belum mau menerima sosialisasi program tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Puskesmas RI Sidomulyo Kota Pekanbaru memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan HIV/AIDS di kalangan LSL. Namun, untuk meningkatkan efektivitas program, maka diperlukan peningkatan dalam pelatihan petugas kesehatan, penyediaan sumber daya yang memadai, serta kampanye untuk mengurangi stigma terhadap LSL.

Kata Kunci : HIV/AIDS, pencegahan, Lelaki Seks Lelaki (LSL), Puskesmas, Kesehatan Masyarakat.

Pendahuluan

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik/pemerintah, seperti departemen-departemen, dan dinas-dinas, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian kebijakan public, administrasi pembangunan, pemerintahan daerah, dan good governance. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Salah satu kebijakan administrasi publi juga diterapkan dalam bidang kesehatan.

Administrasi publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Administrasi publik dalam implementasinya terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala aktivitas administrasi publik diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini salah satu ciri khas administrasi publik yang dikenal dengan istilah legislatik dan formal. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan administrasi publik mendapat pengakuan dan dukungan konstitusi.

Administrasi adalah sebuah sistem Sistem adalah keseluruhan bagian-bagian yang saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Administrasi publik mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan publik. Semua unsur administrasi publik harus menjalankan fungsinya dengan baik. Jika salah satu unsur tidak berjalan, maka akan mempengaruhi unsur yang lain tidak dapat bekerja atau menjalankan fungsinya dengan baik. Jika perencanaan dalam administrasi publik tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik.

Administrasi publik harus bersifat netral Administrasi publik harus bersifat netral dan tidak boleh memihak pada satu aliran, kelompok/golongan dan partai politik tertentu. Hal ini dimaksudkan agar administrasi publik dapat berjalan secara profesional dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan tidak diintervensi oleh kepentingan politik atau partai politik tertentu.

Administrasi publik bersifat adil Administrasi publik harus bersifat adil yaitu melayani semua orang atau masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, maupun antargolongan tertentu. Siapa yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu, prinsip ini dikenal dengan first in first out sehingga tidak ada yang merasa dianaktirikan.

Kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam kesejahteraan masyarakat. Kesehatan termasuk dalam hak asasi manusia yang wajib diwujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya. Derajat kesehatan meningkat maka dapat meningkatkan produktivitas dari masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting untuk mewujudkan kesehatan tersebut melalui kebijakan-kebijakannya. Tujuan dari kebijakan kesehatan yaitu untuk menyediakan pola pencegahan, pola pelayanan, yang terfokus pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit, dan perlindungan terhadap komunitas yang rentan. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah tersebut berguna untuk pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap warga negara untuk hidup secara sehat. Salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi fokus perhatian pemerintah saat ini adalah penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, parasit atau jamur yang berpindah ke orang lain yang sehat. Penyakit menular saat ini yang menjadi fokus perhatian yaitu penyakit menular seksual. Salah satu penyakit menular yang menjadi permasalahan saat ini adalah HIV/AIDS. Hal ini dikarenakan berdasarkan data angka kejadian penyakit kasus HIV/AIDS pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih dan menyebabkan penurunan imunitas manusia (WHO, 2014 dalam Pusdatin Kemenkes, 2014). Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) adalah kumpulan gejala kerusakan sistem kekebalan tubuh bukan disebabkan oleh penyakit bawaan namun disebabkan oleh infeksi yang disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV). Oleh karena itu individu yang terkena HIV akan mudah terserang penyakit seperti sariawan, tbc, atau penyakit kelenjar lainnya. Pencegahan terhadap HIV/AIDS menjadi prioritas utama yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah untuk mencegah angka penyakit ini dapat melalui program preventif yaitu pencegahan. Organisasi publik yang dapat memberikan layanan pencegahan tersebut salah satunya puskesmas. Fasilitas puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat primer yang memiliki program fokus utama yaitu upaya promotif. Angka kejadian penyakit HIV/AIDS di provinsi Riau tercatat paling tinggi pada Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru.

Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Sebagai penyedia program layanan kesehatan nasional, maka pelaksanaan program pencegahan HIV/AIDS di dilakukan dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan pemerintah pusat sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS). Selanjutnya, Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Klinis UPT Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota pekanbaru. Peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Konseling dan Tes HIV. Selanjutnya, program ini juga mengikuti peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2006 tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Permasalahan kasus HIV/AIDS ditengah masyarakat dapat menyebabkan rusaknya peran sosial seorang individu tersebut dalam kehidupan sosial sehingga dapat mempengaruhi produktivitas inidividu tersebut. Perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS di Propinsi Riau meningkat secara eksponensial dengan cukup signifikan, dengan wilayah penularan yang semakin meluas sehingga dapat merupakan ancaman epidemi dimasa yang akan datang. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan pencegahan kasus HIV/AIDS. Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu

melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan. Memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemi dan mencegah diskriminasi.

Kementerian Kesehatan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan model layanan HIV-PIMS (HIV-*Penyakit Infeksi menular Seksual*) yang komprehensif dan berkesinambungan untuk memastikan terselenggaranya layanan komprehensif yang terdesentralisasi dan terintegrasi dalam sistem yang ada hingga ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kebijakan pengendalian HIV-AIDS mengacu pada kebijakan global *Getting To Zeroes*, yaitu :

1. Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV
2. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS
3. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA

Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan mengendalikan penyakit HIV/AIDS yaitu meningkatkan penemuan HIV secara dini, meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV, dan perawatan kronis, melakukan gerakan promosi kesehatan dalam bentuk sosialisasi penyakit HIV/AIDS untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, serta memperluas akses pemeriksaan CD 4 dan Viral Load (VL) termasuk *early infant diagnosis* (EID) hingga ke layanan sekunder terkait untuk meningkatkan jumlah ODHA yang masuk dan tetap dalam perawatan dan pengobatan ARV sesegera mungkin, melalui sistem rujukan pasien ataupun rujukan spesimen pemeriksaan, peningkatan kualitas layanan fasyankes dengan melakukan mentoring klinis yang dilakukan oleh rumah sakit atau FKTP, mengadvokasi pemerintah lokal untuk mengurangi beban biaya terkait layanan tes dan pengobatan HIV-AIDS.

Gerakan utama yang dilakukan fasilitas kesehatan primer dalam menekan angka kejadian HIV/AIDS adalah dengan cara sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk promosi kesehatan agar meningkatkan ilmu pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk bersama-sama menekan angka penyakit HIV/AIDS. Contoh sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan brosur/pamflet/leaflet/atau edukasi terhadap masyarakat mengenai informasi penyakit tersebut.

Terlihat pada data statistik menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Hal ini jika dibiarkan terus maka akan menyebabkan penularan secara sadar maupun tidak sadar kepada masyarakat lainnya. Sehingga dapat menjadi permasalahan kesehatan yang serius nantinya di masa yang akan datang. Oleh karena itu penanggulangan HIV/AIDS memerlukan strategi yang efektif untuk mencegah dan mengurangi resiko penularan HIV, serta meningkatkan kualitas hidup Pasien ODHA. Sehingga keseluruhan upaya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS dapat dilakukan secara optimal.

Permasalahan kesehatan HIV/AIDS di Indonesia merupakan kasus di seperti sebuah fenomena gunung es, yakni merujuk pada kondisi penampakan puncak gunung es diatas permukaan air yang sebenarnya hanya merupakan bagian kecil yang terlihat namun bagian

dalam gunung es tersebut jauh lebih besar. Jumlah kasus yang ditemukan belum mencerminkan masalah yang sesungguhnya yang jauh lebih besar di dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terdeteksi dan mengetahui bahwa dirinya mengidap HIV/AIDS. Jika penyebaran HIV/AIDS ini terus dibiarkan, maka penambahan angka kasus HIV/AIDS ditengah masyarakat akan terus meningkat akibat tertular satu sama lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif untuk menekan angka kejadian HIV/AIDS di Indonesia.

Pemerintah membentuk berbagai upaya untuk mencegah angka kejadian penyakit HIV/AIDS. Program Kesehatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan program yang dibentuk langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dimana merupakan sebuah program prioritas dalam bidang kesehatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pusat layanan kesehatan masyarakat yang disebut juga dengan Puskesmas yang diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Salah satu populasi kunci yang menjadi subjek penelitian ini yaitu pasien LSL. Hal ini dikarenakan, berdasarkan data Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru mencatatkan populasi kunci LSL menjadi orang dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS tertinggi.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Herbert A. Simon, administrasi merupakan kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Leonard D. White mendefinisikan administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Menurut Sondang P. Siagian (dalam Wirman Syafri, 2012:9). Publik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris public. Kata publik merupakan padanan yang tepat jika disandingkan dengan administrasi untuk merujuk pada pengelolaan bersama untuk kepentingan publik. Publik mengandung arti umum, negara dan masyarakat atau orang banyak. Jefkins (2004) mendefinisikan publik sebagai sekelompok orang atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Selanjutnya Ruslan (1997) menyatakan publik mempunyai konotasi sempit dan spesifik yang merupakan sekumpulan individu-individu yang terikat suatu ikatan solidaritas tertentu. Sehingga, Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia (Ibrahim, 2008).

Konsep Organisasi

Menurut Sondang P. Siagian (dalam Kartono 2006:7) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam satu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Tujuan organisasi publik sendiri menurut Etzioni dalam Kartono (2011), yaitu suatu keadaan yang diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. Tujuan organisasi

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi lembaga.

Karakteristik Organisasi Publik yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan. Karakteristik organisasi publik bervariasi dan memiliki maksud masing-masing sendiri dalam merumuskan karakteristiknya. Struktur organisasi pada organisasi publik lebih birokratis dan tersentralisasi. Benih konflik selalu tampak pada struktur. Hanya saja, pada situasi demikian faktor loyalitas anggota organisasi cukup tinggi dan mempunyai daya ikat yang kuat untuk kesatuan organisasi.

Konsep Manajemen

Manajemen diperlukan untuk perusahaan bisnis, institusi pemerintah, layanan pendidikan dan kesehatan, organisasi militer, asosiasi perdagangan, dan lain sebagainya (Powley, Edwards, 2012). Menurut George R. Terry berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Principle of Management", bahwa ada enam unsur pokok yang terkandung dalam manajemen, diantaranya Men and women (manusia/orang), Materials (material), Machines (mesin), Methods (metode/cara), Money (uang), Markets (pasar). Dari beberapa pandangan mengenai unsur-unsur manajemen tersebut, jelas terlihat bahwa manusia merupakan unsur yang paling penting dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia dinilai penting dan harus senantiasa dilakukan, agar dalam penerapan manajemen, baik dalam komunitas (organisasi) maupun dalam konteks personalitas berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Konsep Kebijakan

Negara sebagai suatu organisasi publik selain mempunyai tujuan (goals) yang harus direalisasikan, ia juga mempunyai pelbagai permasalahan yang harus diatasi, dikurangi atau dicegah. Permasalahan tersebut bisa berasal dari masyarakat itu sendiri, bisa juga berasal sebagai dampak negatif dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik, yaitu, nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan yang meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik (Dunn, 1994 :58). Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi juga bersifat dinamis, sehingga pemecahannya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach), yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai bagian dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur sendirian

Pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya Negara apat tercapai. Menurut Partowidaglo dalam Anwar (2011:42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imanjinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan prose yang kompleks, karena itu sifat modl yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak

mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan suatu pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan cristine, 2008;190). Berdasarkan uraian definisi mengenai kebijakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sesuatu yang berangkat dari suatu permasalahan dan di diskusikan sehingga melahirkan suatu kebijakan atau aturan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, kemudian kebijakan tersebut harus di ikuti atau ditaati oleh setiap orang yang bertujuan untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut.

Konsep Sumberdaya

Setiap organisasi atau perusahaan memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan (power) yang diperlukan untuk menciptakan daya, gerakan, aktivitas, kegiatan, dan tindakan. Sumber daya tersebut antara lain terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya ilmu pengetahuan, dan sumber daya teknologi. Diantara sumber tersebut, sumber daya yang terpenting adalah sumber daya manusia (SDM – human resources). SDM merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa SDM, sumber daya lainnya menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Setiap pelaksanaan kegiatan membutuhkan sumber daya berupa biaya, tenaga, peralatan dan atau bahan.

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya. Kita harus memahami bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Dengan berpegangan pada pengertian tersebut, istilah sumber daya manusia adalah manusia bersumber daya dan merupakan kekuatan (power). Agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Hal ini perlu dilakukan melalui Manajemen Sumber Daya Manusia.

Mengutip pernyataan Rivai (2005), keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus, dan menggunakan SDM sehingga dapat berfungsi secara produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegagalan perusahaan dalam mengelola SDMnya dapat mengakibatkan perusahaan gagal dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Definisi MSDM adalah pendekatan strategik dan koheren untuk mengelola aset paling berharga milik organisasi yaitu orang-orang yang bekerja di dalam organisasi, baik secara individu ataupun kolektif, dalam rangka memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran organisasi.

Konsep Implementasi

Studi implementasi merupakan kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Menurut Smith (1973, 202-205) mengungkapkan 4 (empat) faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan, yaitu

1. Kebijakan yang diidealkan (idealized policy)

Yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan;

2. Kelompok sasaran (target groups)

Yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan;

3. Implementing organization

Yaitu badan-organisasi pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan;

4. Environmental factor.

Yakni unsur unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Teori ini digunakan untuk dapat melihat efek suatu kebijakan terhadap orang orang yang menjadi target kebijakan, pertama kita harus dapat melihat permasalahan yang dihadapi dan kebijakan yang timbul sebagai reaksi atas permasalahan tersebut karena sesuai dengan teori Smith dan Larmer Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan tidak hanya untuk menandai keberadaan suatu pemerintahan, melainkan untuk mencapai tujuan yang diantaranya untuk menyelesaikan masalah, melindungi hak, dan untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau

dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman (usman, 2005:70) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Jenis penelitian ini berupaya menganalisis dan menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan faktanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah "Implementasi Program Pencegahan HIV/AIDS Pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) Di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru". Metode Kualitatif menurut Rianse (2009:7) adalah meneliti subyek penelitian atau informan dalam lingkungan hidup kesehariannya. Karena itu, para peneliti Kualitatif sedapat mungkin berinteraksi secara langsung dengan informan, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, mengamati, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat dijalankan dengan efektif di lapangan. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami implementasi kebijakan adalah melalui Model Implementasi Kebijakan dari George C. Edward III dan Thomas B. Smith, yang memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan. Teori Smith mengembangkan Model Interaksi Implementasi Kebijakan yang terdiri dari empat variabel kunci :

1. Kebijakan yang diidealkan

Ide kebijakan merujuk pada konsep atau gagasan utama yang mendasari kebijakan yang diterapkan tersebut. Gagasan yang terkandung dalam kebijakan biasanya selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Kunci keberhasilan kebijakan menurut B Smith tergantung pada kejelasan dan pemahaman terhadap konsep dalam kebijakan tersebut. Kebijakan yang ideal memiliki tujuan yang jelas, yang dirancang dengan spesifik, terukur, dan realistis. Kejelasan tujuan ini penting agar semua pemangku kepentingan memahami apa yang hendak dicapai. Dalam kebijakan yang diidealkan, tujuan harus:

- a. Spesifik dan terarah: Kebijakan yang baik tidak hanya berisi gagasan umum tetapi menguraikan tujuan spesifik yang ingin dicapai.
- b. Dapat diukur: Agar bisa dievaluasi, kebijakan harus menetapkan indikator keberhasilan yang jelas sehingga kemajuan dan hasilnya dapat diukur.
- c. Realistis dan dapat dicapai: Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi yang ada dan sumber daya yang tersedia, sehingga tujuan yang ditetapkan tidak terlalu ambisius atau sulit dicapai dalam jangka waktu yang ada

Secara keseluruhan, *idealized policy* dalam perspektif Thomas B. Smith adalah kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga secara praktis dapat diterapkan, memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi implementasinya, serta memberikan arahan yang jelas kepada para pelaksana untuk mencapai tujuan kebijakan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa implementasi program pencegahan HIV/AIDS pada LSL di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar dan selaras dengan kebijakan nasional yang berlaku.

2. Kelompok sasaran

Thomas B. Smith dalam teorinya menyebutkan kunci keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dapat dilihat dari bagaimana respon atau daya tanggap kelompok yang menjadi target sasaran. Kelompok sasaran sering kali memiliki pola perilaku, persepsi, dan sikap tertentu terhadap pemerintah atau kebijakan baru. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. Persepsi terhadap kebijakan: Jika masyarakat merespons dengan skeptisisme, pemerintah perlu mengedukasi dan melakukan sosialisasi yang lebih intensif.
- b. Sikap terhadap perubahan: Beberapa kelompok mungkin lebih mudah menerima perubahan, sementara yang lain mungkin merasa kebijakan baru mengganggu stabilitas mereka. Kebijakan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan masyarakat terhadap perubahan.

Smith menekankan bahwa melibatkan kelompok sasaran dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan tingkat penerimaan dan keberhasilan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui dalam merancang sumber daya yang dibutuhkan dalam program Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo sudah melakukan sesuai dalam proses manajemen. Proses manajemen merupakan hal yang penting untuk merancang sumber daya yang tepat guna mendukung kelancaran program ini. Secara keseluruhan, *Target Group* dalam perspektif Thomas B. Smith adalah pelaksanaan program pencegahan ini sudah sesuai dengan target yang menjadi populasi kunci. Populasi kunci dalam program ini memiliki sikap yang cukup responsif dan kooperatif dalam mengikuti program pencegahan HIV/AIDS yang di sosialisasikan Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru.

3. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan dari konsep menjadi aksi nyata di lapangan. Peran-peran utama ini mencakup penyusunan Rencana Operasional, organisasi pelaksana harus mampu memecah kebijakan menjadi langkah-langkah operasional yang detail dan dapat diterapkan, pengalokasian Sumber Daya artinya menyediakan sumber daya, seperti tenaga kerja, dana, dan peralatan, yang

diperlukan untuk menjalankan kebijakan, pemberian Layanan artinya organisasi pelaksana bertugas memberikan layanan langsung kepada kelompok sasaran sesuai tujuan kebijakan, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, atau bantuan sosial, pemantauan dan Evaluasi artinya memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mengukur apakah tujuan kebijakan tercapai atau tidak.

Secara keseluruhan indikator Organisasi pelaksana di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru memiliki struktur yang jelas, pegawai yang kompeten, dan sumber daya yang memadai. Koordinasi antarinstansi berjalan efektif, misalnya antara dinas kesehatan, rumah sakit, dan organisasi masyarakat. Terdapat juga mekanisme monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala.

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan tempat kebijakan diterapkan memegang peranan penting juga dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Terdapat beberapa aspek dalam lingkungan tempat kebijakan diterapkan yaitu termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari kebijakan tersebut. Smith menekankan bahwa lingkungan lokal sering kali menentukan apakah kebijakan akan berjalan mulus atau menghadapi hambatan. Kondisi sosial dari masyarakat tempat kebijakan akan diterapkan sangat memengaruhi penerimaan dan keberhasilan kebijakan. Unsur sosial ini mencakup norma, nilai, dan struktur sosial masyarakat. Beberapa aspek penting meliputi:

- a. Norma dan Nilai Sosial: Jika kebijakan sejalan dengan norma dan nilai yang dianut masyarakat, kebijakan akan lebih mudah diterima. Sebaliknya, jika bertentangan, implementasinya bisa mendapatkan perlawanan.
- b. Struktur Sosial: Kehadiran kelompok sosial yang berpengaruh, seperti pemuka agama, tokoh masyarakat, atau organisasi sosial, juga mempengaruhi respons masyarakat terhadap kebijakan. Dukungan dari kelompok-kelompok ini dapat mempercepat proses penerimaan.
- c. Tingkat Literasi dan Pendidikan: Kondisi literasi masyarakat akan menentukan cara kebijakan harus disampaikan. Misalnya, di masyarakat dengan tingkat literasi rendah, diperlukan pendekatan komunikasi yang berbeda agar informasi kebijakan tersampaikan dengan baik.
- d. Faktor ekonomi, seperti tingkat pendapatan, pengangguran, dan distribusi kesejahteraan, berpengaruh pada bagaimana kebijakan diterima dan dilaksanakan. Beberapa contoh dampaknya adalah:
 - 1) Kemampuan Finansial: Masyarakat dengan keterbatasan ekonomi mungkin memerlukan kebijakan dengan dukungan atau subsidi tambahan. Misalnya, kebijakan kesehatan atau pendidikan perlu disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan tersebut.

- 2) Prioritas Ekonomi Lokal: Jika suatu wilayah memiliki prioritas ekonomi tertentu, seperti pertanian atau perikanan, kebijakan yang mendukung sektor ini akan lebih mendapat sambutan baik.
- 3) Kesenjangan Ekonomi: Tingkat kesenjangan ekonomi yang tinggi dapat menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan, terutama jika kebijakan tersebut tidak dirancang untuk merespons kesenjangan ini.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui unsur lingkungan untuk mendukung keberhasilan program pencegahan HIV/AIDS di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru belum memadai. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap indikator unsur lingkungan tersebut. Hal ini diketahui dari hasil wawancara masih ada beberapa lapisan masyarakat yang masih menolak untuk menerima program pencegahan tersebut. Selain itu stigma atau lingkungan sosial pasien HIV/AIDS masih belum mendukung secara optimal karena masih adanya perilaku diskriminasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Pencegahan HIV/AIDS Pada Lelaki Seks Lelaki Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru diketahui beberapa hal setelah dilakukan analisis dengan Teori B Smith. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat 4 indikator yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana yang bertanggung jawab dan unsur lingkungan. Berdasarkan indikator implementasi kebijakan tersebut, maka peneliti menyimpulkan :

1. Kebijakan yang diidealkan, tujuan serta pedoman yang digunakan dalam implementasi program pencegahan HIV/AIDS pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan standar pedoman nasional pencegahan HIV/AIDS yaitu Permenkes RI No 21 Tahun 2013.
2. Kelompok sasaran, jika dilihat dari kelompok sasaran responnya sudah cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan pasien yang sudah terkonfirmasi LSL yang cukup kooperatif dalam menjalankan program pencegahan HIV/AIDS ini.
3. Organisasi pelaksana, untuk faktor ini dapat diketahui sudah cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara pegawai yang terlibat sudah memahami isi dan rancangan kegiatan yang termasuk dalam *roadmap* program pencegahan HIV/AIDS pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru. Pegawai yang terlibat juga memahami secara detail mengenai Standar Operasional Prosedur untuk melaksanakan program pencegahan HIV/AIDS pada Lelaki Seks Lelaki (LSL) di Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo Kota Pekanbaru.
4. Faktor Lingkungan, untuk faktor ini diketahui dari faktor dampak sosial yang belum mumpuni dalam mendukung program tersebut. Terlihat dari respon beberapa kelompok masyarakat yang masih enggan untuk menerima program ini karena stigma masyarakat masih memandang rendah terhadap pasien HIV/AIDS. Berdasarkan hasil wawancara diketahui, sebagian masyarakat masih memiliki stigma dan diskriminatif dalam menghadapi kasus HIV/AIDS.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Anwar Arifin. 2011. Komunikasi Politik Filsafat-Paradigma-Teori-TujuanStrategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Penerbit BPFE
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju
- Kementrian Kesehatan RI. 2014. Pusat Data dan Informasi. Jakarta Selatan: Infodatin.
- Kemenkes RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling Dan Tes HIV
- Powley, Roger., Edwards, Cindy. (2012). Principles of Management. British Columbia: Commonwealth of Learning
- Rianse. A. 2009. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi), Bandung CV. ALFABETA.
- Rivai. V. 2005. Performance Appraisal; Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 2006, Organisasi Kepemimpinan Dan Prilaku Administrasi, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Smith, T. B. 1973. The policy process implementation. *Policy Sciences*, 4, 197- 209.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.

- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.

- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.

- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.

- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.

- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.